

Majalah Ilmiah

Inovasi

Volume 10 No.3

September – Desember 2005

ISSN 0853 – 7399



Redaksi: Jl. Sunan Muria No.3 Rawamangun, Jakarta 13220 Telp. 021-4758756

RELEVANSI DUNIA PENDIDIKAN DENGAN DUNIA KERJA (PERMASALAHAN DAN SOLUSI)

Sukarman Purba *

Abstrak

Pendidikan bukan untuk memenuhi target kesempatan kerja saja, tapi untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan manusia. Sehingga pendidikan merupakan proses penyiapan "man power" yang dibutuhkan oleh berbagai sektor pembangunan. Membahas relevansi pendidikan pada dasarnya menyangkut pendayagunaan tenaga manusia bagi pengembangan diri pribadinya. Kenyataannya, kualitas lulusan lembaga pendidikan masih belum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Berbagai alternatif solutif telah dilakukan agar lulusan pendidikan sesuai dengan permintaan dunia kerja, seperti perubahan kurikulum kejuruan, kurikulum berbasis kompetensi, life-skill, pembelajaran kontekstual, dan pendidikan sistem ganda. Kegagalan konsep "Link and Match" ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah penganggur terdidik di Indonesia. Untuk itu, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan dalam menghadapi tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global maka diperlukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dalam menjembatani relevansi antara dunia pendidikan dengan dunia kerja dapat dilakukan dengan pengembangan sumber daya manusia, reformasi pendidikan, inovasi pendidikan, pendidikan alternatif dan solutif serta pendidikan entrepreneurship.

Key Words : Relevansi Pendidikan, Dunia Kerja, Reformasi Pendidikan, Inovasi Pendidikan, Entrepreneurship.

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global

sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesenabungan.

Kegagalan dari konsep "*Link and Match*" ditandai dengan semakin membengkaknya jumlah penganggur terdidik di Indonesia. Secara kuantitatif tercatat sekitar 40 juta orang tidak mempunyai pekerjaan dan sebagian diantaranya adalah pengangguran terdidik (Depdiknas, 2003). Data empiris menunjukkan bahwa hingga tahun 2003 tersaji lowongan kerja sebanyak 593.153 yang terdaftar pada Depnaker RI, sebanyak 17 persen tidak terisi, sekitar 50 persen diantaranya adalah angkatan kerja berpendidikan sarjana dan sarjana muda, sedangkan paling rendah lulusan SD dan diploma satu (D1) sekitar 10 persen.

Pengangguran dikalangan angkatan kerja terdidik memberi dampak serius pada berbagai dimensi kehidupan. Setidaknya dapat dilihat pada dimensi politik, ekonomi, dan sosial psikologi. Menurut Hutington (Depdiknas, 2003) ditinjau dari segi politik bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan para penganggur, semakin gawat kadar tindakan *destabilitas* yang tercipta. Lulusan perguruan tinggi yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi dapat mendorong pada perubahan sosial yang cepat. Sementara tamatan pendidikan menengah yang tidak bekerja dapat semakin mempergawat kadar ketidak-damaian politik. Dimensi ekonomi, pengangguran berarti pemborosan nasional, investasi pendidikan bila tidak berdaya guna dan berhasil guna berarti terjadi inefisiensi biaya, tenaga, dan waktu yang tak bisa ditagih ulang. Dari dimesi sosial-psikologi, pengangguran terdidik sangat berbahaya. Kemorosotan rasa percaya diri dan harga diri sehingga bisa berujung krisis identitas; apabila krisis ini berlarut-larut dapat berdampak buruk bagi generasi bangsa yang akan mempertahankan dan meneruskan kehidupan bangsa ke depan.

Membludaknya jumlah pengangguran adalah akibat dari ketidakmemadain kualitas pencari kerja. Dengan kata lain, kualitas lulusan lembaga pendidikan tidak cocok dengan kebutuhan dunia

usaha. Isu ketidakcocokan antara pendidikan dan dunia usaha terus menggelinding dan dicari alternatif solusinya. Berbagai *alternative solutif* telah ditawarkan seperti perubahan kurikulum kejuruan, kurikulum berbasis kompetensi, *life-skill*, pembelajaran kontekstual, pendidikan sistem ganda, "*cooperative education (co-ed)*" terutama untuk pendidikan jalur sekolah atau perguruan tinggi. Namun, permasalahan apakah lembaga pendidikan formal itu diarahkan kepada lulusan siap pakai atau siap latih atau siap beradaptasi yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dunia usaha?

B. PEMBAHASAN

1. Konsep relevansi pendidikan

Beberapa konsep yang merujuk kepada pengertian relevansi, diantaranya, konsep siap pakai, siap latih, siap beradaptasi. Perdebatan yang tak kunjung selesai tentang periselisihan makna dan ukuran peristilahan siap pakai, siap latih, dan siap beradaptasi. Konsep lain yang mencuat kepermukaan adalah konsep "*Link and Match*", yang ditetapkan sebagai "*core business*" (isu sentral kebijakan) Depdikbud dan "*core-competence*" Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia. Konsep *Link and Match* mengandung arti bahwa kepentingan siswa/ mahasiswa yang diutamakan, hubungan erat antara dunia pendidikan dengan dunia luar (dunia kerja), dunia luar yang berubah dengan cepat memerlukan keluwesan dari dunia pendidikan untuk dapat beradaptasi dan usaha menuju pendidikan yang berkualitas untuk dapat menghadapi kompetisi dan globalisasi. Dengan demikian, pengertian *link and match* adalah usaha terus menerus untuk mencapai mutu dan keunggulan. Konsekuensinya, lahir berbagai perubahan mendasar tentang struktur dan isi kurikulum, perubahan struktur program pendidikan kejuruan setara pendidikan menengah dan program profesional pada perguruan tinggi. Revitalisasi dan *regrouping* pendidikan kejuruan dan profesional terus dilakukan, bahkan keterlibatan langsung pihak pemakai lulusan pendidikan dilakukan

dengan lahirnya kebijakan Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Bertitik tolak dari kebijakan *Link and Match* ini, pendidikan kejuruan merekomendasikan 8 butir prinsip reformasi pendidikan kejuruan, yaitu: 1) Berubah dari pendekatan *Supply driven* menjadi *Demand driven*, 2) Berubah dari orientasi perolehan ijazah menjadi orientasi perolehan kompetensi, 3) Berubah dari sistem persekolahan yang kaku menjadi lentur (*flexible*), 4) Berubah dari hanya mengakui kompetensi sendiri menjadi menghargai pengalaman yang diperoleh, 5) berubah dari sistem pendidikan yang berbasis sekolah sepenuhnya menjadi berbasis ganda; 6) Berubah menjadi pengintegrasian pendidikan dan pelatihan kejuruan secara terpadu; 7) Berubah dari pengelolaan secara terpusat menjadi pengelolaan desentralisasi; 8) Berubah dari ketergantungan pada pemerintah menjadi swadana dan swakelola. Sedangkan, *link and match* pada Perguruan Tinggi (PT) masih perlu dijabarkan ke dalam program kerja dari PT, yaitu: 1) Pendirian Fakultas di dalam PT tidak didasarkan keinginan yayasan atau pendidik tapi pada kebutuhan "pasar" atau dunia kerja sehingga perlu dilakukan evaluasi pasar; 2) Kompetensi, yaitu penguasaan ilmu dan keahlian diutamakan; 3) Peningkatan sistem Kredit dari satu PT dengan PT lain sehingga memungkinkan adanya transfer; 4) Pengakuan kompetensi berdasarkan pengalaman kerja menjadi salah satu unsur penilaian, sehingga terbuka peluang kerja sama dengan industri; 5) Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan di PT, dengan orientasi pada kompetensi; 6) Transfer dimungkinkan antara bidang ilmu dan penelitian di dunia usaha dengan PT; 7) Kebutuhan pasar domestik atau luar negeri, juga kebutuhan mahasiswa untuk masa depan; dan 8) Perguruan Tinggi Negeri dapat mengelola anggarannya sendiri.

2. Faktor penyebab ketidakcocokan
Banyak faktor yang menyebabkan ketidakcocokan antara pendidikan dan dunia usaha yang berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran terdidik, yang diantaranya adalah: (1) ketidakcocokan

antara karakteristik lulusan baru yang memasuki dunia kerja (sisi penawaran tenaga kerja/ *supply*) dengan kesempatan kerja yang tersedia (sisi permintaan tenaga kerja/ *demand*). Ketidak cocok ini mungkin bersifat geografis, jenis pekerjaan, orientasi status atau masalah keahlian khusus; (2) semakin terdidik seseorang, semakin besar harapannya pada jenis pekerjaan yang aman. Golongan ini menilai tinggi pekerjaan yang stabil dari pada pekerjaan yang berisiko tinggi sehingga lebih suka bekerja pada perusahaan besar daripada membuka usaha sendiri. (3) terbatasnya daya serap tenaga kerja sektor formal sementara angkatan kerja terdidik cenderung memasuki sektor formal yang kurang berisiko. Hal ini menimbulkan tekanan penawaran tenaga kerja terdidik yang jumlahnya cukup besar memberi tekanan kuat terhadap kesempatan kerja di sektor formal yang jumlahnya relatif kecil, sehingga terjadi pendayagunaan tenaga kerja terdidik yang tidak optimal. (4) belum efisiennya fungsi pasar tenaga kerja. Lalu lintas informasi yang macet dan bahkan tidak sejalin antara dunia usaha dan dunia pendidikan menyebabkan banyak angkatan kerja yang bekerja di luar bidangnya karena salah salur dan salah tempat kerja sehingga mengakibatkan ketidak-efektifan dan ketidakefisienan penggunaan tenaga kerja; dan (5) faktor X, yaitu kebijakan yang bersifat informal dan KKN sulit dideteksi, tetapi sulit pula dipungkiri di lapangan dengan alasan keamanan, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan (bumi putra), terutama dalam era otonomi daerah yang mana kekuasaan pemerintah daerah sangat besar.

3. Solusi dalam mengatasi kesenjangan Relevansi Pendidikan

a. Pengembangan sumber daya manusia (SDM)

Pada hakekatnya, pengembangan SDM dapat dikelompokkan ke dalam empat pokok masalah, yaitu: (1) standar kualitas manusia, (2) kesempatan kerja dan pengembangan tenaga kerja, (3) peningkatan mutu kehidupan, dan 4) ilmu pengetahuan dan teknologi serta mutu pendidikan. Upaya pengembangan kualitas SDM difokuskan pada

peningkatan nilai tambah, yang merupakan proses berkesinambungan yang dapat meningkatkan kemampuan orang yang mengalami proses tersebut. Gaffar (1987) mengemukakan bahwa pendidikan dalam konteks pembangunan harus diartikan sebagai "suatu proses pengembangan manusia hingga manusia tumbuh optimal sebagai manusia yang beradab tinggi. Ciri-ciri manusia beradab tinggi ini adalah keseluruhan aspek diri manusia itu tumbuh dan matang: berfikirnya matang, pengetahuannya matang, perasaannya matang, kepribadiannya matang, keterampilannya matang dan kemampuannya matang pula. Pendidikan ditujukan kepada seluruh segi kehidupan, bukan segi kesempatan kerja saja karena kesempatan kerja hanya salah satu dari kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, pendidikan lebih tepat diartikan sebagai suatu proses penyiapan "man power" yang dibutuhkan oleh berbagai sektor pembangunan. Menurut Purba (2004) bahwa untuk mendapatkan SDM yang berkualitas dapat dilakukan melalui : 1) Pendidikan dasar sampai perguruan tinggi; 2) Program pendidikan latihan yang sistemik maupun informal; dan 3) pengembangan diri sendiri, atas inisiatif sendiri berupaya memperoleh pengetahuan dan ketrampilan. Dalam membahas masalah relevansi pendidikan pada dasarnya berbicara tentang masalah pendayagunaan tenaga manusia bagi kebutuhan pengembangan diri pribadinya, karena pendidikan pada hakekatnya merupakan pengembangan sumber daya manusia. Upaya meningkatkan relevansi pendidikan tidak dapat berjalan sepotong-sepotong, melainkan perlu menyangkut keseluruhan sistem. Kecenderungan sistem pendidikan nasional dapat dilihat dari tiga komponen dasar, yaitu: (1) visi, misi, dan tujuan pendidikan, (2) organisasi dan mekanisme kerja, dan (3) perangkat pendukung.

b. Reformasi pendidikan yang berkelanjutan
Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di tengah-tengah persaingan kompetitif maka dunia pendidikan harus lebih terbuka kepada arus perubahan internal dan eksternal yang positif,

seperti dalam bidang ekonomi dan informasi, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, dituntut sumber daya manusia yang makin berkualitas, dan mampu bekerja pada dunia usaha atau membuka usaha sendiri. Dengan adanya reformasi pendidikan maka diperlukan *educated and civilzed human being*, yaitu menciptakan masyarakat madani, masyarakat yang cerdas dan bermoral, dapat berdiri sendiri dan bekerjasama dengan orang lain untuk menciptakan masyarakat sejahtera. Untuk itu, Lembaga pendidikan harus mampu mempersiapkan kemampuan dasar yang memungkinkan seseorang lulusan lembaga pendidikan mampu megembangkan diri untuk dapat bekerja di dunia usaha atau dunia kerja sepanjang hidupnya. Kompetensi dasar itu pada garis besarnya mencakup kemampuan personal, sosial, dan profesional. Menurut Wardiman Djojonegoro (dalam Tilaar, 2002) bahwa ada tujuh kompetensi umum yang diperlukan dunia kerja dan perlu *di-supply* oleh dunia pendidikan, yaitu : 1) Kemampuan mengumpulkan, menganalisis dan menyusun informasi 2) Kemampuan berkomunikasi (lisan dan tertulis), 3) Kemampuan merencanakan dan mengorganisasi kegiatan, 4) Kemampuan bekerja sama dengan orang lain dalam suatu tim kerja, 5) Kemampuan mempergunakan teknik dan logika matematika, 6) Kemampuan memecahkan masalah, dan 7) Kemampuan memanfaatkan teknologi. Untuk itu, Sekolah maupun Pendidikan Tinggi (PT) harus melakukan reformasi secara berkelanjutan di dalam proses pembelajaran dan pengajarannya.

Dalam menghadapi tantangan era global, maka dunia pendidikan harus mampu mengubah diri dengan mengubah pola pikir pokok (*mindset*) dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Menurut Tilaar (2002) bahwa pola pikir pokok ini bertitik tolak dari : 1) Sekolah maupun PT bukanlah tujuan akhir, tetapi tempat mendapatkan bekal untuk meneruskan profesi atau pekerjaan, 2) Siswa atau mahasiswa adalah titipan masyarakat kepada dunia pendidikan, 3) pengabdian para pendidik tercapai jika anak didik dapat diterima dan

berkarya di dunia luar (dunia kerja) dan berhasil maju, 4) Dunia luar terus berubah sehingga ilmu yang diajarkan harus disesuaikan secara terus menerus, 5) kompetensi atau kapabilitas siswa atau mahasiswa menjadi ukuran utama sehingga kurikulum harus diselaraskan dengan tuntutan *learning needs*, tuntutan dunia kerja, dan menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK sehingga kurikulum perlu ditentukan bersama dengan dunia kerja atau pasar berdasarkan kebutuhan saat ini dan di masa yang akan datang, 6) Penyelenggaraan pendidikan harus luwes, 7) Perlu adanya desentralisasi kewenangan pendidikan kepada sekolah, 8) Pembiayaan pendidikan masih terbatas sehingga sekolah maupun PT diberi kemandirian untuk mencari keuangan sendiri.

Untuk itu, sistem pendekatan belajar (*learning approach*) maupun pendekatan pembelajarannya (*instructional method*) harus berorientasi pada proses pembelajarannya yang bermutu, hasil juga bermutu, baik bermutu dalam bidang akademik, bermutu dalam pendampingan emosionalnya dan bermutu dalam pembimbingan spritualnya (Syufrana, 2003). Pembelajaran yang bermutu, guru maupun dosen diberi kebebasan untuk mengaktualisasikan bidang pembelajaran secara optimal sehingga potensi-potensi peserta didik dapat berkembang. Model pembelajaran mengacu pada *Learning to know, Learning to do, Learning to live together dan Learning to be*.

Selain itu, dunia pendidikan perlu membekali peserta didiknya dengan kecakapan hidup (*life skill*), yaitu kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani menghadapi hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Untuk itu, dunia pendidikan harus mampu mensinergikan berbagai mata pelajaran/ mata kuliah menjadi kecakapan hidup yang diperlukan seseorang, dimanapun ia berada, bekerja atau tidak bekerja. Kecakapan hidup disini dapat dibedakan atas kecakapan personal (*Personal skill*) mencakup kecakapan mengenal diri (*self awareness*) dan kecakapan berfikir rasional (*thinking skill*), Kecakapan sosial (*Social skill*),

kecakapan akademik (*Academic skill*) dan kecakapan Vokasional (*Vocational skill*) (Depdiknas, 2002). Dengan bekal kecakapan hidup ini diharapkan para lulusan dunia pendidikan akan mampu memecahkan problem kehidupan yang dihadapi, termasuk mencari dan menciptakan pekerjaan bagi yang tidak melanjutkan pendidikannya. Menurut Bently (2000), untuk mewujudkan hal itu, perlu diterapkan prinsip pendidikan berbasis luas yang tidak hanya berorientasi pada bidang akademik atau vokasional semata, tetapi juga diberikan bekal *learning how to learn* sekaligus *learning how to unlearn*, tidak hanya belajar teori, tetapi mampu mempraktekkan dan memecahkan problem kehidupan sehari-hari.

c. Inovasi Dunia Pendidikan

Perubahan yang telah, sedang dan akan terjadi disegala aspek kehidupan manusia telah mendorong setiap pihak untuk segera merespon sesuai dengan kondisi, kemampuan dan tujuan masing-masing. Khusus dalam dunia pendidikan, terlihat beberapa kecenderungan umum sebagai respon terhadap perubahan tersebut, yaitu :

- 1) Pilihan untuk memperoleh jenis pendidikan dan pelatihan semakin beraneka ragam, yang tercermin dari sistem informasi yang semakin beraneka ragam. Hal ini mengakibatkan Budaya *self-learning*, *discovery learning* dan *problem solving* yang makin meluas, sehingga pola kewajiban belajar menjadi berubah.
- 2) Orientasi pendidikan dan latihan berorientasi kepada kebutuhan dunia kerja dan peningkatan kemampuan profesional setiap orang.

d. Pendidikan Alternatif dan solutif

Dalam proses pendidikan tersaji sejumlah alternatif dan solusi berupa pelayanan pendidikan alternatif dan solutif sesuai dengan kemampuan akademis, bakat dan minat siswa, serta orientasi kerja siswa mulai dari SLTP sampai pada perguruan tinggi. Program

pendidikan alternatif yang berkembang di dunia pendidikan menengah dan perguruan tinggi, misalnya pendidikan sistem ganda, "co-educative program", sistem pemagangan, program praktek lapangan, dan program inklusif kuliah kerja nyata (KKN) dan kuliah kerja usaha (KKU). Program alternatif yang ditawarkan kepada siswa dan mahasiswa dapat berupa program kerja sama antar jalur, jenis dan satuan pendidikan, seperti pendidikan formal di sekolah dan pendidikan non formal di lembaga pelatihan dan kursus di tengah masyarakat. Pada waktu ke depan sudah saatnya dilakukan perpaduan program pendidikan alternatif lintas departemen/ instansi yang menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang bersifat kedinasan atau pekerjaan lapangan.

e. Pendidikan *Entrepreneurship* (kewirausahaan)

Program Kewirausahaan berfungsi sebagai aktivitas yang pada saatnya nanti mewujudkan *Income Generating Unit* yang mutlak diperlukan dengan pemberlakuan Otonomi Pendidikan. Pendidikan kewirausahaan merupakan kebutuhan yang harus diberikan dalam dunia pendidikan. Pendidikan Kewirausahaan akan menambah wawasan dan menempa jiwa untuk mampu mandiri di atas kemampuan sendiri tanpa mengharapkan batuan orang lain. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan merupakan 'pintu gerbang' dalam membentuk dan menumbuhkan pribadi yang ulet dan tangguh serta berkualitas dan mampu memberdayakan potensi yang dimiliki dalam menciptakan inovasi baru sehingga menghasilkan nilai tambah bagi kehidupan, keluarga, masyarakat maupun negara. Kesiapan dalam menghadapi era globalisasi, maka budaya kewirausahaan harus terwujud sebagai *sublimasi* ilmu pengetahuan dan teknologi, paling tidak pada sebahagian besar lulusan pendidikan. Dengan demikian, dunia pendidikan akan mampu berfungsi sebagai *Industrial Park* dengan hadirnya lulusan pendidikan sebagai wirausahawan baru pada

industri-industri kecil dan menengah dengan berbasis produk hasil-hasil penelitian.

C. PENUTUP

Masalah relevansi merupakan masalah yang tiada ujung pangkalnya, saat ini relevan dengan kebutuhan masyarakat, namun belum tentu relevan pada masa yang akan datang. Berbagai upaya dilakukan seperti perubahan kurikulum, sistem pembelajaran agar pendidikan dapat relevan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia kerja. Upaya yang dilakukan untuk menjembatani relevansi antara dunia pendidikan dengan dunia kerja dapat dilakukan dengan pengembangan sumber daya manusia, reformasi pendidikan, inovasi pendidikan, pendidikan alternatif dan solutif serta pendidikan *entrepreneurship*.

Dengan digulirkannya otonomi daerah, yang salah satu tujuannya adalah berkaitan dengan unsur relevansi dan pemerataan pendidikan maka manajemen pendidikan harus dapat mengarahkan pada berbagai kebijakan untuk terwujudnya kualitas yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Artinya, pemerintah daerah memberikan otonomi kepada sekolah agar sekolah mampu berbuat dan mengembangkan kemampuannya atau potensinya untuk berbuat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia kerja dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Disamping itu, pemerintah daerah harus membantu dalam pengadaan dana pendidikan agar pendidikan dapat dijangkau dan dinikmati oleh seluruh masyarakat di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bently, Tom. 2000. *Learning Beyond The Classroom: Education for Changing World*. London: Routledge Falmer.
- Depdiknas. 2002. *Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill Education)*. Jakarta : Depdiknas

- _____. 2003. *Tujuh Isu Pendidikan, Balitbang & Pusat Data dan Informasi Pendidikan*. Jakarta : Depdiknas
- Dirjen Dikdasmen. 2003. *Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta : Bagian Proyek Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir nasional.
- Forum Keadilan, Nomor 42, Tanggal 21 Maret 2004, h.56
- Gaffar, Mohammad Fakry. 1987. *Perencanaan Pendidikan: Teori dan Metodologi*, Jakarta : Depdikbud, Dirjen Dikti- Proyek PLPTK.
- Purba, Sukarman. 2004. "Manajemen Pendidikan dalam menghadapi Kompetisi Global". *Makalah*. Jakarta : Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta.
- Tilaar, H.A.R. *Pendidikan Untuk Masyarakat Indonesia Baru*, 70 Tahun. Jakarta : Grasindo. 2002. h. 268
- Sufyarma, M. 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.

* Drs. Sukarman Purba, M.Pd adalah Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FT - UNIMED